

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
TINGKAT SATUAN KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

: Terwujudnya masyarakat Yogyakarta yang taat beragama , rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat , mandiri dan berkepribadian, nerdasarkan gotong royong.

: meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragam,menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan,mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan agama, pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

/ISI :

ISI :

TUJUAN :

No	Risiko Teridentifikasi	Rincian Penanganan			Usulan Perbaikan	Penanggung Jawab
		Rencana Pengendalian	Realisasi	Yang belum Tertangani		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai kinerja penyuluh kurang dari 85	Rakordasi Pokjalah, Supervisi KUA	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
2	Persentase penyuluh agama yang dibina kurang dari 75 %	Rakordasi Pokjalah, Supervisi KUA, Pembinaan penyuluh	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
3	Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi kurang dari 500 orang	Pembinaan penyiur agama	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
4	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi kurang dari 120 orang/lembaga	Supervisi KUA	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
5	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat kurang dari 100%	Pembinaan moderasi bagi penyuluh agama	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
6	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya kurang dari 80 orang	FGD takmir masjid se Kota Yogyakarta	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam

7	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik kurang dari 76 kegiatan	Monev Keterbukaan Informasi Publik	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
8	Jumlah KUA yang direvitalisasi kurang dari 3 KUA	Monev KUA Revitalisasi	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
9	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana kurang dari 5 KUA	Supervisi KUA	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
10	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 686 orang	Supervisi KUA	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
11	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah dibawah 280 orang	Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
12	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina kurang dari 30 orang	Supervisi KUA	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam
13	kurangnya Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan tatap muka dan layanan pusaka sakinah	Supervisi KUA	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Katolik
14	Layanan Haji Kota Yogyakarta terintegrasi dengan Layanan PTSP sehingga Layanan yang diberikan diatas standar Layanan	Monitoring pelaksanaan SOP Pelayanan Publik	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
15	Jumlah Jemaah Haji Kota Yogyakarta yang mengikuti manasik haji baik tingkat Kab/Kota maupun Tk KUA Kecamatan sekitar 30 %	Program mashair (Manasik Haji On Air)	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
16	penyelenggaraan assesmen kompetensi siswa di madrasah hanya 1 ANBK	Monev ANBK	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

17	siswa yang mengikuti assesmen di madrasah kurang dari 100%	Monev ANBK	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
18	siswa penerima BOS Madrasah kurang dari 4589 siswa	Monev BOS	Terlaksana sesuai rencana	BOSDA untuk siswa madrasah dari luar Kota Yogyakarta	Regulasi yang mengakomodir BOS untuk siswa dari luar Kota yogyakarta	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
19	siswa madrasah penerima PIP kurang dari 19%	Monev PIP	Terlaksana sesuai rencana	-	-	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

Kepala



Nadhif

INFORMASI DAN KOMUNIKASI
HASIL ANALISIS DAN PENINGKATAN RESIKO
TINGKAT SATUAN KERJA

1. **VISI** : Terwujudnya masyarakat Yogyakarta yang taat beragama , rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat , mandiri dan berkepribadian, berdasarkan gotong royong.
2. **MISI**: meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berlatar khas agama, dan pendidikan agama, pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.
3. **SASARAN STRATEGIS** : Terlaksananya seluruh MISI

No	Pengendalian yang direncanakan		Bentuk/Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2		3	4	5	6
1	Nilai Kinerja penyuluh agama (IKSK.1)	Rakordasi Pokjajuh, Supervisi KUA	Rapat Koordinasi, Monitoring dan evaluasi	Kapokjajuh	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
2	Persentase penyuluh agama yang dilbina (IKSK.2)	Rakordasi Pokjajuh, Supervisi KUA, Pembinaan penyuluh	Rakordasi Pokjajuh, Supervisi KUA, Pembinaan penyuluh	Kapokjajuh, kapokjajuh	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
3	Jumlah penylar agama yang dilbina kompetensi (IKSK.3)	Pembinaan penylar agama	Rapat koordinasi	Penylar Agama	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
4	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi (IKSK.1)	Supervisi KUA	Monitoring dan evaluasi	Kepala KUA	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
5	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat (IKSK.1)	Pembinaan moderasi bagi penyuluh agama	Rapat	Kapokjajuh	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
6	Jumlah Iman Besar masjid yang ditingkatkan mutunya (IKSK.3)	FGD takmir masjid se Kota Yogyakarta	Rapat	DMI Kota Yogyakarta	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
7	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik (IKSK.1)	Monev Keterbukaan Informasi Publik	Monitoring dan evaluasi	Humas Kemenag Kota Yogyakarta	Kasubbag TU Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
8	Jumlah KUA yang direvitalisasi (IKSK.1)	Monev KUA Revitalisasi	Monitoring dan evaluasi	Kepala KUA	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
9	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (IKSK.2)	Supervisi KUA	Monitoring dan evaluasi	Kepala KUA	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
10	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah (IKSK.3)	Supervisi KUA	Monitoring dan evaluasi	Kepala KUA	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
11	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan,cegah kawin anak dan seks pra nikah	Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)	Rapat	Kepala KUA	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
12	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dilbina (IKSK.5)	Supervisi KUA	Monitoring dan evaluasi	Kepala KUA	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
13	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hjttta sukhaya (IKSK.1)	Supervisi KUA	Monitoring dan evaluasi	Kepala KUA	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023

INFORMASI DAN KOMUNIKASI
HASIL ANALISIS DAN PENINGKATAN RESIKO
TINGKAT SATUAN KERJA

1. VISI : Terwujudnya masyarakat Yogyakarta yang taat beragama , rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat , mandiri dan berkepribadian, nerdasarkan gotong royong.
MISI: meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragam, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan agama, pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.
- 2.
3. SASARAN STRATEGIS : Terlaksananya seluruh MISI

No	Pengendalian yang direncanakan		Bentuk/Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2		3	4	5	6
14	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan (IKSK.1)	Monitoring pelaksanaan SOP Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi	Analisis Tata Laksana	Kasubbag TU Kemenag Kota Yogyakarta	Tahun 2023
15	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji (IKSK.1)	Program mashair (Manasik Haji On Air)	Live streaming manasik haji	Tim Mashair (Manasik Haji On Air)	Kasi PHU	Tahun 2023
16	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan (IKSK.5)	Monev ANBK	monitoring dan evaluasi lapangan	Kepala Madrasah	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Tahun 2023
17	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi (IKSK.6)	Monev ANBK	monitoring dan evaluasi lapangan	Kepala Madrasah	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Tahun 2023
18	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah (IKSK.1)	Monev BOS	monitoring dan evaluasi lapangan	Kepala Madrasah	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Tahun 2023
19	Persentase siswa madrasah penerima PIP (IKSK.3)	Monev PIP	monitoring dan evaluasi lapangan	Kepala Madrasah	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Tahun 2023



IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO ORGANISASI
TINGKAT SATUAN KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

VISI : Terwujudnya masyarakat Yogyakarta yang taat beragama , rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat , mandiri dan berkepribadian, nerdasarkan gotong royong.

MISI: meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragam, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan agama, pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

SASARAN STRATEGIS : Terlaksananya seluruh MISI

Indikator Kinerja Utama	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skor	Diskripsi Status Risiko
2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai kinerja penyuluh agama (IKSK.1)	Nilai kinerja penyuluh kurang dari 85	SDM kurang pelatihan, tidak adanya punishment	Kinerja kualitas bimbingan dan penyuluhan agama tidak tercapai	3	3	9	Tinggi
Persentase penyuluh agama yang dibina (IKSK.2)	Persentase penyuluh agama yang dibina kurang dari 75 %	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan penyuluh	Penyuluh kurang maksimal dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat	3	3	9	Tinggi
Jumlah penyalir agama yang dibina kompetensi (IKSK 3)	Jumlah penyalir agama yang dibina kompetensi kurang dari 500 orang	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi bagi penyuluh	Penyuluh kurang maksimal dalam kompetensi untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat	3	3	9	Tinggi
Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan (IKSK 4)	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan kurang dari 106 kelompok	Kurangnya pelatihan SDM penyuluh	Penyuluh tidak dapat memaksimalkan binaan kelompok masyarakat agar lebih berdaya	2	2	4	Rendah
Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti (IKSK.1)	Kurangnya pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang prosedur perizinan tempat ibadah, sehingga rawan menimbulkan protes dari pemeluk agama lainb.	Kurangnya sosialisasi pengurusan perizinan tempat ibadah.	Rawan terjadinya gesekan antar umat beragama karena adanya tempat ibadah yang tidak berizinan.	2	2	4	Rendah
Jumlah aktor kerukunan yang dibina (IKSK.2)	Jumlah aktor kerukunan yang dibina 120 orang	Kurangnya anggaran untuk dapat memfasilitasi pembinaan aktor kerukunan	Kegiatan tidak bisa berjalan dengan lancar	1	1	1	Rendah
Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina (IKSK. 3)	Jumlah Desa Sadar Kerukunan yang dibina berjumlah 1	Kurangnya anggaran untuk dapat memfasilitasi pembinaan desa kerukunan	Kegiatan pembinaan desa kerukunan tidak optimal	1	1	1	Rendah
Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi (IKSK.1)	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi kurang dari 120 orang/lembaga	Kurangnya anggaran untuk dapat memfasilitasi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat	Lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat kurang maksimal dalam melaksanakan fungsi keagamaan di masyarakat	3	3	9	Tinggi
Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan (IKSK.2)	Jumlah forum antar umat beragama yang diselenggarakan (2)	Kurangnya anggaran untuk mengadakan forum dialog antar umat beragama	Dialog antar umat beragama menjadi tidak optimal	1	1	1	Rendah
Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP (IKSK.1)	Sekber FKUB yang ditingkatkan layanan melalui BOP 100 persen	Kurangnya anggaran untuk meningkatkan layanan sekber FKUB melalui BOP	Pelayanan di Sekber FKUB menjadi tidak maksimal	1	1	1	Rendah

Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama (IKSK.1)	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama kurang dari 72 %	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan intra umat beragama	lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat tidak dapat terorganisir dengan baik, kurang maksimal dalam melaksanakan fungsi keagamaan di masyarakat	2	3	6	Rendah
Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan (IKSK.2)	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan kurang dari 9 Kegiatan	Kurangnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan forum dialog	Tidak adanya wadah forum dialog intra umat beragama yang difasilitasi pemerintah	2	2	4	Rendah
Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat (IKSK.1)	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat kurang dari 100%	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan penyuluh	Penyuluh agama tidak berwawasan moderat	3	3	9	Tinggi
Persentase rumah ibadah yang ramah (IKSK.1)	Persentase rumah ibadah yang ramah kurang dari 63%	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan rumah ibadah yang ramah	rumah ibadah yang tidak ramah	1	2	2	Sangat rendah
Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina (IKSK.2)	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina kurang dari 54%	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan pengelola rumah ibadah	Kurang pemahaman masyarakat untuk mengelola rumah ibadah agar menjadi lebih baik	1	2	2	sangat rendah
Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya (IKSK.3)	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya kurang dari 80 orang	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan imam Besar masjid	Imam Besar masjid mutunya rendah	2	3	6	Tinggi
Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan (IKSK.4)	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan kurang dari 2 lokasi	Kinerja penyuluh kurang optimal dan kurang pelatihan untuk melaksanakan peningkatan rumah ibadah menjadi percontohan	Kurangnya rumah ibadah yang dapat dijadikan untuk percontohan	2	2	4	Rendah
Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik (IKSK.1)	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik kurang dari 76 kegiatan	SDM kurang pelatihan untuk melaksanakan siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan penyuluhan keagamaan yang berwawasan moderat hanya dalam lingkup kecil saja	3	3	9	Tinggi
Persentase Siswa di madrasah/sekolah yang memperoleh pendidikan keagamaan yang bermuatan moderasi beragama (IKSK.1)	siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama kurang dari 100%	kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan moderasi beragama bagi siswa	kurangnya pemahaman siswa tentang moderasi beragama	1	1	1	sangat rendah
Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama kurang dari 100%	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan moderasi beragama bagi siswa	kurangnya pemahaman siswa tentang moderasi beragama	1	1	1	sangat rendah
Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama tidak mencapai 100%	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan moderasi beragama	Kurangnya pemahaman siswa tentang moderasi beragama	1	2	2	sangat rendah
Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama (IKSK.4)	guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama tidak mencapai 100%	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan moderasi beragama bagi guru	Kurang optimalnya penguatan moderasi beragama bagi guru	1	1	1	sangat rendah
Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama (IKSK.5)	Persentase guru di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama tidak mencapai 100%	Kurangnya Anggaran Pembinaan Moderasi Beragama	Tidak optimalnya penguatan moderasi beragama bagi guru	1	2	2	sangat rendah
Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama (IKSK.6)	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama kurang dari 100%	Kurangnya Anggaran Pembinaan Moderasi Beragama	Pembinaan Moderasi Beragama bagi Guru di Sekolah Keagamaan tidak memenuhi target	1	1	1	sangat Rendah
Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama (IKSK.7)	pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama tidak mencapai 100%	Kurangnya Anggaran Pembinaan Moderasi Beragama	Kurang optimalnya penguatan moderasi beragama bagi pengawas	1	1	1	sangat Rendah

Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama (IKSK.9)	Persentase pengawas di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama tidak mencapai 100%	Kurangnya Anggaran Pembinaan Moderasi Beragama	Kurang optimalnya penguatan moderasi beragama bagi guru	1	2	2	Rendah
Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama hanya 2 kegiatan	Kurangnya peminat ekstrakurikuler keagamaan	kurangnya pemahaman moderasi beragama melalui ekstrakurikuler	1	1	1	sangat rendah
Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Minimnya jumlah Kegiatan Ektrakurikuler keagamaan di Sekolah Keagamaan yang bermuatan Moderasi Beragama	Kurangnya SDM Pengampu, Kurangnya minat siswa untuk mengikutinya	Jumlah Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan sangat minim, sehingga target tidak terpenuhi	1	1	1	Sangat rendah
Persentase pesantren yang berwawasan moderat (IKSK.1)	Persentasi pesantren yang berwawasan moderat hanya 95%	Support Anggaran masih minim	Peningkatan Pesantren berwawasan Moderat tidak tercapai	2	1	2	Resiko Rendah
Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an (IKSK.2)	Persentase peningkatan peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al Qur'an tidak sesuai target	Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al Qar'an ; Sulitnya aturan/persyaratan untuk pengajuan ijin operasional : Lemahnya SDM	Peningkatan Peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al Qur'an tidak tercapai	2	1	2	Rendah
Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan (IKSK.1)	Jumlah dialog lintas agama yang berhasil diselenggarakan (14)	Kurangnya anggaran untuk mengadakan dialog lintas agama dan budaya	Dialog lintas agama dan budaya menjadi tidak maksimal	1	1	1	REndah
Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) (IKSK.1)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat kurang dari 17 lokasi	Kurangnya pembinaan SDM untuk mengelola produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat	Masyarakat tidak menerima manfaat dari produk budaya yang berbasis agama	2	2	4	Rendah
Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dll)	Tidak adanya kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama	Tidak adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama	Tidak adanya syiar agama untuk mencintai alquran bagi masyarakat	2	2	4	Rendah
Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	Tidak adanya pembinaan untuk direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah	Tidak adanya pelatihan dan pembinaan SDM inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah	Tidak adanya pemahaman untuk direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah	1	2	2	Rendah
Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina (IKSK.2)	Tidak adanya pembinaan untuk pengelola perpustakaan rumah ibadah	Tidak adanya pelatihan dan pembinaan SDM untuk pengelola perpustakaan rumah ibadah	Kinerja pengelola perpustakaan rumah ibadah kurang maksimal	1	2	2	Rendah
Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan (IKSK.1)	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan kurang dari 4 paket	Tidak adanya bantuan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana layanan peribadatan untuk masjid dan mushola	Tidak tersedianya sarana dan prasarana layanan peribadatan di masjid/mushola	1	2	2	Rendah
Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan (IKSK.2)	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan kurang dari 210 buah	Tidak adanya bantuan anggaran untuk pengadaan kitab suci, buku keagamaan	Tidak tersedianya kitab suci dan buku keagamaan di masjid/mushola	1	2	2	Rendah
Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi (IKSK.3)	Jumlah persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi kurang dari 86%	Tidak adanya bantuan anggaran untuk lembaga keagamaan	Banyaknya lembaga keagamaan yang tidak terfasilitasi	1	2	2	Rendah
Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan (IKSK.4)	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan kurang dari 8 layanan	Tidak adanya pelatihan SDM untuk memberikan layanan syariah	Masyarakat tidak dapat mendapatkan bimbingan layanan syariah	2	2	4	Rendah
Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat (IKSK.5)	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat kurang dari 4 lokasi	Tidak adanya pelatihan SDM untuk mengukur arah kiblat	kurangnya masjid/mushola yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	2	2	4	Rendah

Jumlah KUA yang direvitalisasi (IKSK.1)	Jumlah KUA yang direvitalisasi kurang dari 3 KUA	Kurangnya dukungan anggaran dan SDM yang memadai untuk mewujudkan KUA revitalisasi	Peningkatan layanan keagamaan pada masyarakat dan kualitas kehidupan umat beragama sesuai PMA No.34 Tahun 2016 tentang 10 fungsi peran KUA menjadi terganggu	2	4	8	Tinggi
Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (IKSK.2)	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana kurang dari 5 KUA	Kurangnya dukungan anggaran untuk mewujudkan sarana dan prasarana KUA yang mumpuni demi dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	3	3	9	Tinggi
Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah (IKSK.3)	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 686 orang	Kurangnya kesadaran dari calon pengantin tentang pentingnya kursus pra nikah	Kurangnya pengetahuan dan kemampuan pasangan calon pengantin dengan mengelola rumah tangga. Sehingga upaya dalam meminimalisir perceraian dan persiapan menghadapi problema rumah tangga tidak dapat dihindari	3	3	9	Tinggi
Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah dibawah 280 orang	Kurangnya dukungan dari pihak sekolah untuk turut mendukung terlaksanannya program bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Kurangnya pemahaman bagi remaja usia sekolah tentang pengetahuan nikah usia dini dan seks pra nikah	2	4	8	Tinggi
Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina (IKSK.5)	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina kurang dari 30 orang	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan penghulu	Pengetahuan penghulu tentang regulasi terbaru menjadi rendah	2	3	6	Tinggi
Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya (IKSK.1)	kurangnya Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan tatap muka dan layanan pusaka sakinah	Kurangnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan tatap muka pusaka sakinah	Masyarakat yang memiliki permasalahan keluarga dan perkawinan semakin meningkat	3	3	9	Tinggi
Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi (IKSK.1)	Jumlah PPIU Kota Yogyakarta yang telah terbina/terawasi melalui monitoring & supervisi sejumlah 20 lembaga	Kota Yogyakarta sebagai jantung Kota baik pemerintah Kota maupun provinsi sehingga banyaknya PPIU yang ada di Kota Yogyakarta	kurang maksimalnya pengawasan terhadap menjamurnya PPIU yang ada di Kota Yogyakarta	2	2	4	Rendah
Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan (IKSK.1)	Layanan Haji Kota Yogyakarta terintegrasi dengan Layanan PTSP sehingga Layanan yang diberikan diatas standar Layanan	Kota Yogyakarta merupakan kota yang yang menjadi rujukan studybanding / percontohan dan Kota yang sudah memulai layanan berbasis semi digital/digital, sehingga Layanan Publik merupakan salah satu program prioritas yang diberikan kepada penenggara layanan	Layanan publik dengan cepat, ramah, transparan dan Rp. 0	2	2	4	Tinggi
Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu (IKSK.2)	Rakordasi Lintas Sektoral tentang Pemberangkatan /pemulangan Jemaah berdampak penyelenggaraan Haji bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya mengenai transportasi jemaah dari ke Asrama Haji / Embarkasi yang sudah ditentukan jadwal keberangkatan / pemulangannya	bersinerginya berbagai pihak terkait dalam mensukseskan penyelenggaraan haji khususnya transportasi	Layanan yang terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan	2	2	4	Rendah

Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji (IKSK.1)	Jumlah Jemaah Haji Kota Yogyakarta yang mengikuti manasik haji baik tingkat Kab/Kota maupun Tk KUA Kecamatan sekitar 30 %	Bayaknya jemaah yang terdaftar di Kota Yogyakarta , namun sekitar 30 % tidak berdomisili di Kota Yk dikarenakan faktor pekerjaan maupun pindah domisilinya transportasi	Kota Yogyakarta kesulitan untuk mewujudkan 100 % bimbingan manasik kecuali pada saat pemberangkatan /pemuatan	2	2	4	Tinggi
Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) (IKSK.1)	Persentase keberlanjutan layanan kurang dari 100%	Aplikasi siskohat mengalami error	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1	1	1	Sangat Rendah
Persentase amil yang dibina (IKSK.1)	Persentase Amil yang dibina kurang dari 68	Kurangnya Anggaran Pembinaan Amil	Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat tidak tercapai	2	2	4	Rendah
Persentase lembaga zakat yang dibina (IKSK.2)	Persentase Lembaga Zakat yang dibina kurang dari 70	Kurangnya Anggaran Pembinaan Lembaga Zakat	Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat tidak tercapai	2	2	4	Rendah
Persentase lembaga wakaf yang dibina (IKSK.1)	Persentase Lembaga Wakaf yang dibina kurang dari 100	Kurangnya Anggaran Pembinaan Lembaga Wakaf	Peningkatan Pengelolaan Aset Wakaf tidak tercapai	2	2	4	Rendah
Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan (IKSK.2)	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan kurang dari 94	Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Berwakaf	Peningkatan Pengelolaan Aset Wakaf tidak tercapai	3	2	6	Rendah
Persentase tanah wakaf yang bersertifikat (IKSK.3)	Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat kurang dari 96	Kurangnya SDM yang Kompeten yang menangani Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA	Peningkatan Pengelolaan Aset Wakaf tidak tercapai	2	2	4	Rendah
Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum (IKSK.1)	madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif kurang dari 81%	Kurangnya SDM yang menerapkan metode pembelajaran inovatif	pembelajaran masih menggunakan metode klasik	1	1	1	Sangat rendah
Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum (IKSK.2)	Presentase Sekolah Keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Kurangnya pembekalan/pelatihan bagi Tenaga Pendidik	Penerapan metode pembelajaran inovatif tidak sesuai target	1	1	1	sangat rendah
Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan (IKSK.3)	madrasah yang melaksanakan program keagamaan hanya 1	Kurangnya SDM dan Sarpras madrasah yang melaksanakan program keagamaan	hanya 1 madrasah yang lolos memenuhi program keagamaan	1	1	1	sangat rendah
Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan (IKSK.4)	madrasah yang melaksanakan program ketrampilan/kejuruan hanya 1	Kurangnya SDM dan Sarpras madrasah yang melaksanakan program ketrampilan/kejuruan	hanya 1 madrasah yang lolos memenuhi program ketrampilan/kejuruan	1	1	1	sangat rendah
Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan (IKSK.1)	Penilaian kinerja guru madrasah sebagai dasar penetapan tunjangan kurang dari 48%	penetapan tunjangan guru berdasarkan MI negeri dan madrasah swasta	penilaian kinerja kurang maksimal	1	1	1	sangat rendah
Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan (IKSK.3)	Guru yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan tidak mencapai 56%	Kurangnya pelatihan dan PPG	Kurangnya kualitas penilaian pendidikan	2	2	4	rendah
Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah keagamaan	penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah kurang dari 3 penghargaan	Kurangnya minat nya guru dan tendik dalam mengikuti berbagai pembinaan	penghargaan yang didapatkan sedikit	1	1	1	sangat rendah
Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan (IKSK.5)	penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah hanya 1 ANBK	kurangnya program dari pusat terkait asesmen kompetensi siswa	banyak siswa yang tidak mengetahui kompotensinya	1	3	3	tinggi
Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi (IKSK.6)	siswa yang mengikuti asesmen di madrasah kurang dari 100%	pemilihan siswa untuk mengikuti assesment secara sampling/sistem	tidak dapat menentukan siswa yang akan mengikuti assesment	1	3	3	tinggi
Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi (IKSK.7)	100% siswa mengikuti asesmen kompetensi siswa di Sekolah Keagamaan	Siswa dianjurkan mengikuti untuk mengukur hasil pembelajarab	untuk mengetahui potensi siswa terkait literasi, numerasi, sains, sosial budaya	1	1	1	sangat rendah
Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadallah (IKSK.1) yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran kurang dari 100%	TIK untuk e-pembelajaran tidak dapat diterapkan	madrasah tertinggal terkait TIK nya	1	2	2	rendah

1	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran (IKSK.2)	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Sekolah Keagamaan sudah menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Seluruh Sekolah Keagamaan sudah menerapkan TIK dalam e-pembelajaran	1	1	1	sangat rendah
1	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran (IKSK.3)	mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran kurang dari 100%	mata pelajaran di madrasah tidak berbasis TIK	mapel tidak bisa diakses menggunakan TIK	1	2	2	rendah
	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran (IKSK.4)	Persentase mata pelajaran di Sekolah Keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran sebanyak 100%	Minim Anggaran untuk pelatihan peningkatan SDM	Mapel di sekolah keagamaan berbasis TIK	1	1	1	sangat rendah
1	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana (IKSK.2)	MI yang memenuhi SPM Sarana Prasarana kurang dari 85%	Kurangnya anggaran MI dalam memenuhi SPM sarana prasarana	Minimnya sarpras yang tersedia	1	2	2	rendah
1	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya	MTs yang memenuhi SPM Sarana Prasarana kurang dari 86%	Kurangnya anggaran MTs dalam memenuhi SPM sarana prasarana	Sarpras yang tersedia minim	1	2	2	rendah
1	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya	MA yang memenuhi SPM Sarana dan Prasarana kurang dari 84%	Kurangnya anggaran MA dalam memenuhi SPM sarana prasarana	sarpras yang tersedia minim	1	2	2	rendah
1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah (IKSK.1)	siswa penerima BOS Madrasah kurang dari 4589 siswa	Siswa penerima BOSDA berdasarkan KK Kota	Tidak semua siswa mendapatkan BOSDA	2	3	6	tinggi
1	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah (IKSK.2)	jumlah siswa penerima BOS Sekolah Keagamaan 252 siswa	Semua Siswa Sekolah Keagamaan mengapat BOS anggaran Pusat	Peningkatan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar tidak tercapai	2	2	4	rendah
1	Persentase siswa madrasah penerima PIP (IKSK.3)	siswa madrasah penerima PIP kurang dari 19%	SK penerima PIP langsung dari pusat	penerima PIP tidak merata	2	3	6	tinggi
1	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP (IKSK.4)	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP hanya 40%	Penetapan kuota penerima PIP dari Pusat	Tidak semua usulan Penerima PIP disetujui oleh Pusat, dan hanya beberapa nama siswa yang masuk SK	2	1	2	rendah
1	Persentase Pondok pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional (IKSK.5)	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan tidak memenuhi target 18%	Penetapan kuota penerima BOP Pesantren dari Pusat, SDM Operator Data masih kurang	Tidak semua usulan BOP Pesantren disetujui oleh Pusat	2	2	4	rendah
2	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava "Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP (IKSK.1)"	penerima BOP RA kurang dari 400 siswa	Terlambat update data dari EMIS sebagai dasar pengajuan anggaran BOP	tidak mendapatkan alokasi anggaran	2	4	8	sangat tinggi
1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi (IKSK.1)	guru madrasah yang lulus sertifikasi belum 100%	terbatasnya kuota sertifikasi guru	masih ada guru madrasah yang belum tersertifikasi	2	2	4	Resiko Rendah
1	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi (IKSK.2)	kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi kurang dari 50%	Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi kepala/guru/tenaga kependidikan	kualitas kepala/guru/tenaga kependidikan kurang maksimal	2	2	4	Resiko Rendah
1	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi (IKSK.3)	Persentase Kepala Pendidikan Diniyah/Muadalah yang memperoleh Peningkatan Kompetensi 70%	Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi	Peningkatan kompetensi Kepala Pendidikan Diniyah/Muadalah tidak tercapai	1	1	1	Sangat Rendah
1	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal (IKSK.1)	Persentase Guru Sekolah Keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 87%	Kurangnya SDM yang terlatih, kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi	Tidak terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	2	2	Resiko Rendah
1	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal (IKSK.2)	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 87%	Kurangnya SDM, dan anggaran peningkatan kompetensi	Peningkatan kompetensi minimal tenaga kependidikan tidak sesuai target	1	1	1	Resiko Sangat Rendah

	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal (IKSK.3)	Persentase guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal tidak mencapai 89%	Kurangnya SDM yang terlatih, kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi	Tidak terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	2	2	Resiko Rendah
	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG (IKSK.1)	persentase guru madrasah yang mengikuti PPG tidak mencapai	Terbatasnya kuota PPG tidak sebanding dengan jumlah guru, kurangnya anggaran dari pusat untuk diklat PPG	Kurangnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	3	2	6	Tinggi
	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG (IKSK.2)	Persentase guru yang mengikuti PPG tidak mencapai 55%	Terbatasnya kuota PPG tidak sebanding dengan jumlah guru, kurangnya anggaran dari pusat untuk diklat PPG	Kurangnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	3	2	6	Tinggi
	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1 (IKSK.3)	Guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1	SDM guru yang tidak mau menempuh pendidikan S1	Tidak optimalnya kualitas pendidikan	1	1	1	Sangat rendah
	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi (IKSK.1)	Madrasah yang difasilitasi dalam mengajukan status akreditasi kurang dari 17 madrasah	pengajuan akreditasi madrasah belum masanya	tidak terakreditasinya madrasah	1	3	3	Tinggi
	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu (IKSK.1)	sarana dan prasarana madrasah yang belum lengkap	kurangnya anggaran untuk melengkapi sarpras madrasah	Penerapan budaya mutu pada Sekolah Keagamaan belum memenuhi standar	1	1	1	rendah
	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu (IKSK.2)	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu hanya 56%	Kurangnya Anggaran, sehingga minim sosialisasi	Penerapan budaya mutu pada Sekolah Keagamaan belum memenuhi standar	1	2	2	rendah
	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional (IKSK.3)	siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional hanya 2 %	kurangnya SDM siswa yang potensial	siswa kurang siap berkompetisi	1	1	1	rendah
	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional (IKSK.4)	siswa Sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional kurang dari 1 %	kurangnya SDM siswa yang potensial	Meningkatnya budaya mutu pendidikan tidak tercapai	1	1	1	Sangat rendah
	Persentase Madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran (IKSK.1)	madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran kurang 100%	kurangnya penanaman pendidikan karakter kepada siswa dalam pembelajarannya	rendahnya pendidikan karakter siswa	2	2	4	rendah
	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran (IKSK.2)	100% Sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Sekolah Keagamaan sudah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam pembelajaran pada Sekolah Keagamaan sudah tercapai	1	1	1	sangat rendah
0	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman (IKSK.3)	10% Kepala Pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	Kurangnya SDM yang terlatih dan Anggaran untuk peningkatan kompetensi	Pembinaan Kepala Pendidikan diniyah/muadalah dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman belum tercapai	2	2	4	rendah
1	Persentase madrasah yang ramah anak (IKSK.4)	madrasah yang ramah anak kurang dari 33%	67% madrasah belum mendeklarasikan menjadi madrasah ramah anak	tidak teridentifikasi madrasah yang ramah anak	1	1	1	rendah
2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanannya kurang dari 11 madrasah	madrasah yang organisasi siswa ekstrakurikulernya dibina kepeloporannya dan kesukarelawanannya kurang dari 11 madrasah	kurangnya SDM Pembina ekstrakurikuler yang kompeten jenjang MTs/MA	organisasi ekstra jenjang MTs/MA yang terbentuk sedikit	1	1	1	rendah
3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina (IKSK.3)	gugus pramuka madrasah yang dibina hanya 4 Madrasah negeri	Madrasah Negeri di wilayah Kota hanya ada 4	Sedikit sekali madrasah yang bisa menjadi gugus pramuka karena hanya madrasah negeri	1	1	1	rendah
4	Persentase produk hukum yang diterbitkan (IKSK.1)	persentase produk hukum melebihi target, namun penyusunan dan pengarsipan produk hukum belum optimal	Ada SK dibuat setelah kegiatan berlangsung dan belum diarsip secara digital	Produk Hukum yang diterbitkan secara kuantitas optimal sedangkan secara kualitas belum optimal	1	1	1	sangat rendah

5	Persentase kasus hukum yang terselesaikan (IKSK.2)	Persentase kasus hukum yang terselesaikan kurang dari 92%	Kurangnya SDM yang menangani masalah hukum	Menurunnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	1	1	sangat rendah
6	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan (IKSK.3)	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan kurang dari 10 Kegiatan	Kurangnya SDM yang menangani masalah hukum	Menurunnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	1	1	sangat rendah
7	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja (IKSK.1)	Dokumen perencanaan ASN yang tidak sesuai kebutuhan satuan kerja	Data tidak update (bezetting, ABK)	Penempatan tidak sesuai formasi sehingga kinerja tidak optimal	1	2	2	sangat rendah
8	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti (IKSK.2)	Tiada tindak lanjut laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun	Penundaan proses menuntaskan pelaporan terkait permasalahan kepegawaian	Meningkatnya kualitas Pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	1	1	sangat rendah
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan (IKSK.3)	Tiada kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	Tertundanya proses menuntaskan pelaporan terkait permasalahan kepegawaian	Meningkatnya kualitas Pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	1	1	sangat rendah
0	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) (IKSK.4)	Persentase ASN yang memiliki IP sedang kurang dari 10%	Nilai unsur pelatihan dan pengembangan masing-masing pegawai masih kurang	Kurang adanya peningkatan kualitas pengelolaan ASN	3	2	6	rendah
1	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu (IKSK.6)	Persentase pengusulan mutasi terlambat	proses pertimbangan serta kewenangan pengusulan pegawai prosedurnya lama	Meningkatnya kualitas Pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) tidak tercapai	2	2	4	rendah
2	Persentase data ASN yang diupdate (IKSK.7)	Persentase data ASN yang diupdate tidak tercapai	ASN Yang tidak melakukan pemutahiran data mandiri	Kualitas Pengelolaan ASN kurang meningkat	3	3	9	Tinggi
3	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses (IKSK.8)	Layanan tidak terakses	Terjadi kendala sistem operasi di server aplikasi kepegawaian	Meningkatnya kualitas Pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) tidak tercapai	2	2	4	rendah
4	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu (IKSK.1)	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu kurang dari 80	Kepatuhan ASN keuangan maupun petugas SAI terhadap penyelesaian to do list pada aplikasi sakti pada masa pelaporan serta kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi pemerintah	Sanksi tertundanya pencairan anggaran Belanja Negara oleh Bendahara dan kepatuhan terhadap perundangan kurang maksimal	2	2	4	Rendah
5	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) (IKSK.2)	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan belum mencapai 89	Sosialisasi terhadap Regulasi dan kurangnya Bimtek PIPK pada ASN lingkup satker	Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan kurang optimal	2	2	4	Rendah
6	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal (IKSK.3)	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran kurang dari 99	DIPA estimasi pada jenis belanja PNBPN tidak terpenuhi maksimal karena jumlah penerimaan tidak sesuai dengan perkiraan	Realisasi Pelaksanaan Anggaran sedikit kurang optimal dari target yang ditetapkan	2	2	4	Rendah
7	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama (IKSK.4)	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama kurang dari 92	Mekanisme pembayaran uang makan dan Tunjangan Kinerja Bulan Desember dan Keterbatasan waktu pembayaran uang makan bulan Desember ke rekening pegawai	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan serta tunjangan kinerja tertunda dan menjadi pendapatan negara pada awal tahun anggaran berikutnya	2	2	4	Rendah
8	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya (IKSK.1)	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya kurang dari 84	Kurangnya pemahaman SDM dalam pengelolaan BMN	BMN yang digunakan menjadi kurang efisien dan pemborosan dalam biaya operasional serta penurunan pendapatan negara	2	2	4	Rendah

9	Persentase tanah yang bersertifikat (IKSK.2)	Persentase tanah yang bersertifikat kurang dari 98	Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pendaftaran tanah yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tanah BMN yang bersertifikat.	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Aset yang bisa dimanfaatkan sesuai tujuan dan tertundanya perolehan manfaat yang maksimal dari penggunaannya	2	2	4	Rendah
3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN (IKSK.3)	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN kurang dari 85	Kurangnya pemahaman tentang BMN dan SDM yang terlatih dan berpengalaman	Ketidaksesuaian antara nilai Aset yang dilaporkan dengan kondisi riil di lapangan	2	2	4	Rendah
1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis (IKSK.1)	Standar operasional prosedur belum berdasarkan peta proses bisnis	Kurangnya pemahaman aktor unit kerja terkait peta proses bisnis	Ketidaksesuaian dokumen SOP dengan peta proses bisnis	1	1	1	Sangat Rendah
2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi (IKSK.2)	Laporan kinerja organisasi belum dievaluasi	Instrumen evaluasi laporan kinerja belum terstandarisasi	Tidak terdeteksinya kendala, hambatan, tantangan, keunggulan terkait hasil laporan kinerja	1	1	1	Sangat Rendah
3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (IKSK.3)	bentuk format TLHP yang berubah-ubah	ada perbedaan persepsi antara yang di inginkan auditor dengan penerima TLHP	penyelesaian TLHP (temuan administrasi) menjadi lebih lama	1	2	2	Rendah
4	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (IKSK.1)	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi kurang dari 86 %	Kurangnya SDM yang menangani ZI di Madrasah	Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi tidak tercapai	2	2	4	Rendah
5	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas (IKSK.2)	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas kurang dari 2	Terbatasnya metode dan waktu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi tidak tercapai	2	2	4	Rendah
5	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja (IKSK.1)	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja kurang dari 15	terbatasnya anggaran pelaksanaan diklat/pelatihan bagi agen perubahan	Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi tidak tercapai	2	2	4	Rendah
7	Persentase output perencanaan yang berbasis data (IKSK.1)	Data perencanaan kurang valid	Data berasal dari banyak sumber (belum ada integrasi data antar unit kerja)	Outcome yang diharapkan tidak sesuai dengan output perencanaan	1	1	1	Sangat Rendah
8	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra (IKSK.2)	Muatan Renja ada kemungkinan tidak dapat mendukung renstra	Anggaran untuk menunjang Renja sudah terplotting dari Kemenag RI, tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Renja	Terpaku pada anggaran yang diplotting Kemenag RI	2	2	4	Rendah
9	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti (IKSK.3)	Tidak semua usulan program diterima oleh pemerintah kota Yogyakarta	Usulan program yang diterima dan diberikan bantuan anggaran disesuaikan dengan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta	Beberapa usulan kegiatan yang diajukan tidak dapat didanai dari bantuan Pemerintah Kota Yogyakarta	2	2	4	Rendah
0	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas (IKSK.1)	Kualitas Laporan capaian kinerja belum maksimal	Pemaparan hasil kegiatan dan dokumen pendukung dalam pencapaian kinerja dari masing-masing pengampu kegiatan kurang lengkap	Kualitas capaian kinerja satker kurang maksimal	3	2	6	Rendah
1	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti (IKSK.2)	Pemantauan, evaluasi dan pengendalian belum maksimal	Terbatasnya anggaran yang diberikan dari pusat	Rencana pembangunan nasional tidak termonitor & tidak dapat dievaluasi secara mendalam	3	2	6	Rendah
2	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar (IKSK.1)	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar kurang dari 86 %	Kurangnya anggaran yang dibutuhkan	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tidak tercapai	3	2	6	Rendah

3	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu (IKSK.1)	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu lebih dari 95%	Ada beberapa surat masuk yang terlambat disampaikan kepada pengelola surat masuk, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut. Namun persentasenya sedikit sekali.	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	1	1	Rendah
4	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik (IKSK.2)	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik kurang dari 89%	Masih ada dokumen yang dikirim tidak secara elektronik, beberapa dokumen dikirim secara manual karena keterbatasan informasi mengenai kanal pengiriman surat yang dituju	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	2	2	Rendah
5	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen (IKSK.3)	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen kurang dari 91%	belum semua unit kerja memiliki scanner yang memenuhi syarat untuk pengarsipan, terutama di KUA	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	2	2	Rendah
6	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan (IKSK.1)	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Tamu belum mengisi buku tamu dan survey kepuasan, sehingga tidak bisa diukur tingkat kepuasannya	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1	2	2	Rendah
7	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi (IKSK.1)	Persentase pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasikan mencapai lebih dari 90 persen	Kurangnya sumber daya yang menangani publikasi dan pemberitaan	Pemberitaan dan publikasi program dan kegiatan menjadi tidak maksimal	1	1	1	Rendah
8	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter (IKSK.2)	Persentase pemberitaan tentang Kemenag yang dicounter mencapai lebih dari 90 persen	Kurangnya anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung publikasi di media massa	Tidak maksimalnya publikasi yang mencounter pemberitaan program Kemenag yang perlu dicounter	1	1	1	Rendah
9	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable (IKSK.1)	- Data keagamaan yang valid, dan reliable tidak mencapai 85% - Data pendidikan yang valid, dan reliable tidak mencapai 85%	Kurangnya jumlah SDM yang menangani data, kurangnya anggaran pembinaan data	Menurunnya kualitas data dan sistem informasi	1	2	2	sangat rendah
10	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional (IKSK.1)	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang terlambat memperoleh gaji, tunjangan, dan Operasional	Keterlambatan Penerimaan Surat Keputusan Pegawai	Tertundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Guru pegawai PNS yang memperoleh Gaji tunjangan dan operasional	1	1	1	Sangat rendah



**KEGIATAN PENGENDALIAN
TINGKAT SATUAN KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

atur/Satker/UPT : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
 rogram : Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama
 ujuan : Pengukuran Moderasi Beragama
 asaran Strategis : Meningkatkan kualitas

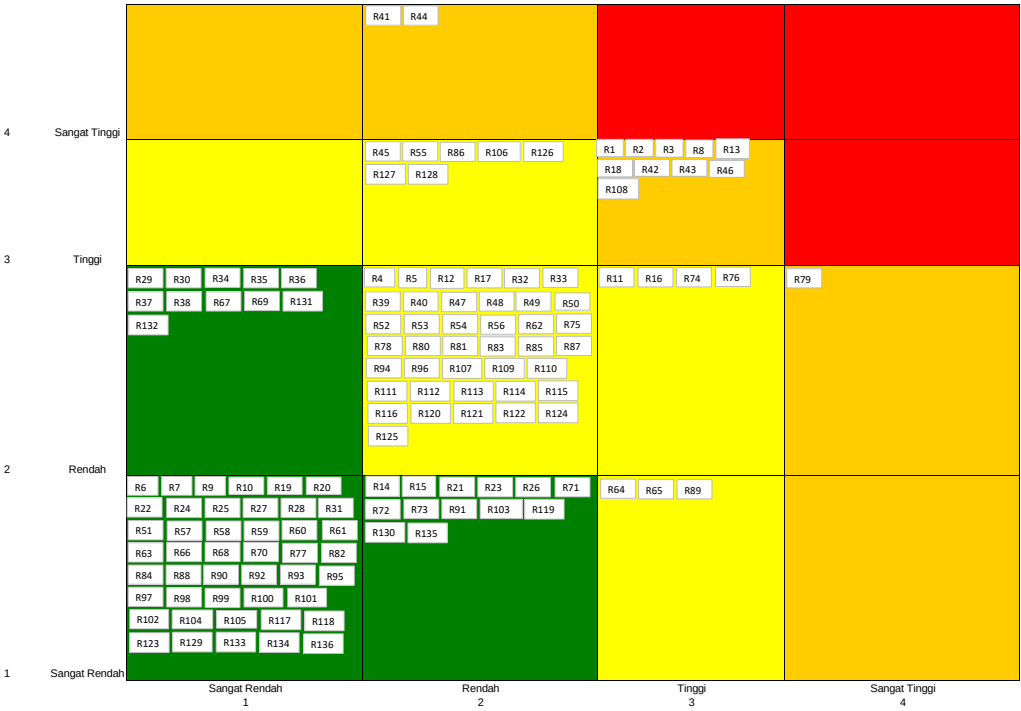
No	Indikator Kinerja Utama	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Rincian Penanganan			Rencana Penanganan	
				Pengendalian yang ada	Efektif/tidak Efektif	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai kinerja penyuluh agama (IKSK.1)	Nilai kinerja penyuluh kurang dari 85	SDM kurang pelatihan, tidak adanya punishment	Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Efektif	Rakordasi Kelompok Kerja Penyuluh, Supervisi KUA	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
	Persentase penyuluh agama yang dibina (IKSK.2)	Persentase penyuluh agama yang dibina kurang dari 75 %	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan penyuluh	Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
	Jumlah penyalur agama yang dibina kompetensi (IKSK.3)	Jumlah penyalur agama yang dibina kompetensi kurang dari 500 orang	Kurangnya anggaran untuk meningkatkan kompetensi bagi penyalur	Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi (IKSK.1)	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi kurang dari 120 orang/lembaga	Kurangnya anggaran untuk dapat memfasilitasi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat	Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat (IKSK.1)	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat kurang dari 100%	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan penyuluh	Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya (IKSK.3)	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya kurang dari 80 orang	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan imam Besar masjid	Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik (IKSK.1)	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik kurang dari 76 kegiatan	SDM kurang pelatihan untuk melaksanakan siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2021	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
	Jumlah KUA yang direvitalisasi (IKSK.1)	Jumlah KUA yang direvitalisasi kurang dari 3 KUA	Kurangnya dukungan anggaran dan SDM yang memadai untuk mewujudkan KUA revitalisasi	KMA No. 578 Tahun 2021	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (IKSK.2)	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana kurang dari 5 KUA	Kurangnya dukungan anggaran untuk mewujudkan sarana dan prasarana KUA yang mumpuni demi dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.	KMA No. 578 Tahun 2021	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah (IKSK.3)	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 686 orang	Kurangnya kesadaran dari calon pengantin tentang pentingnya kursus pra nikah	Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023

Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah dibawah 280 orang	Kurangnya dukungan dari pihak sekolah untuk turut mendukung terlaksanannya program bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina (IKSK.5)	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina kurang dari 30 orang	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan penghulu	SOP	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam	Tahun 2023
Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya (IKSK.1)	Kurangnya Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan tatap muka dan layanan pusaka sakinah	Kurangnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan tatap muka pusaka sakinah	SOP	Efektif	-	Kepala Seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Katolik	Tahun 2023
Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan (IKSK.1)	Layanan Haji Kota Yogyakarta terintegrasi dengan Layanan PTSP sehingga Layanan yang diberikan diatas standar Layanan	Kota Yogyakarta merupakan kota yang yang menjadi rujukan studybanding / percontohan dan Kota yang sudah memulai layanan berbasis semi digital/digital, sehingga Layanan Publik merupakan salah satu program prioritas yang diberikan kepada penengguna layanan	SOP	Efektif	-	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahun 2023
Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji (IKSK.1)	Jumlah Jemaah Haji Kota Yogyakarta yang mengikuti manasik haji baik tingkat Kab/Kota maupun Tk KUA Kecamatan sekitar 30 %	Banyaknya jemaah yang terdaftar di Kota Yogyakarta , namun sekitar 30 % tidak berdomisili di Kota Yk dikarenakan faktor pekerjaan maupun pindah domisilisnya transportasi	Mashair (Manasik haji on Air)	Efektif	-	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tahun 2023
Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan (IKSK.5)	penyelenggaraan assesmen kompetensi siswa di madrasah hanya 1 ANBK	kurangnya program dari pusat terkait assesmen kompetensi siswa	Assesmen susulan	Efektif	-	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Tahun 2023
Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi (IKSK.6)	siswa yang mengikuti assesmen di madrasah kurang dari 100%	pemilihan siswa untuk mengikuti assesment secara sampling/sistem		Efektif	-	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Tahun 2023
Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah (IKSK.1)	siswa penerima BOS Madrasah kurang dari 4589 siswa	Siswa penerima BOSDA berdasarkan KK Kota	Perwal No.	Efektif	Regulasi untuk mengatur siswa luar kota	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Tahun 2023
Persentase siswa madrasah penerima PIP (IKSK.3)	siswa madrasah penerima PIP kurang dari 19%	SK penerima PIP langsung dari pusat	PMA	Efektif	-	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Tahun 2023



IMPACT / DAMPAK

GARIS
TOLERANSI
RISIKO



LIKELIHOOD / KEMUNGKINAN / PROBABILITAS

GARIS TOLERANSI RISIKO

KETERANGAN :
SANGAT RENDAH
RENDAH
KUNING MUDA
KUNING TUA
MERAH
SANGAT TINGGI